

PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HISTORIS KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN JEPANG

Hery Setyo Adji

Abstract

Disconnection of modern and traditional sector is often assumed as the effects of government policies that are very oriented on economic growth. Whereas, economic development is a long term process. In this context, a discourse will be incomprehensive if it doesn't look at the roots of the government policies in the early days of Indonesian development process.

Therefore, this article discusses the historical perspective so that the discourse will be comprehensive.

PEMBANGUNAN ekonomi semua negara selalu mengalami suatu transformasi ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern. Hanya masalahnya, waktu yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lain. Dalam terminologi Ekonomi Pembangunan, yang disebut sebagai sektor tradisional adalah sektor primer (pertanian). Sedangkan sektor moderen adalah sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa). Pada tahap awal pembangunan suatu negara, sektor pertanian biasanya mendominasi struktur ekonominya sebagaimana sejarah negara-negara yang sekarang berpredikat sebagai negara industri. Seiring dengan perkembangan perekonomiannya peran sektor pertanian akan digeser oleh sektor yang lain yakni sektor industri dan jasa. Masa-masa awal pembangunan ekonomi negara-negara itu selalu ditandai oleh dominasinya sektor pertanian.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, proses transformasi ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern sudah dimulai sejak diperkenalkannya industri gula di Jawa. Keberadaan industri gula merupakan tonggak

dimulainya perubahan struktur ekonomi Indonesia. Industri gula yang mewakili organisasi ekonomi moderen tersebut menjadi faktor yang menentukan dinamika ekonomi selanjutnya. Dinamika ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah bertambahnya kompleksitas persoalan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi.

Awal perubahan struktural sangat menentukan proses perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara. Hanya saja, masalah akan timbul jika dalam proses itu terjadi keterlepaskaitan antara sektor tradisional dan sektor modern. Keterlepaskaitan antara sektor moderen dengan sektor tradisional ini merupakan dualisme ekonomi (J.H. Boeke menyebut) yaitu bahwa perkembangan sektor moderen berjalan secara terpisah dengan perkembangan sektor tradisional.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji secara historis proses terpisahnya perkembangan antara sektor moderen dan tradisional di Indonesia. Kajian historis ini dimulai dari masa kolonialisme, baik oleh Belanda maupun Jepang. Kolonialisme kita anggap sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi keterlepaskaitan tersebut.

Tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa pemerhati sejarah ekonomi Indonesia (kebanyakan adalah sejarawan asing) yang pada umumnya berkesimpulan bahwa Belanda (penjajah) memberikan fondasi yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, yakni ketika Belanda memperkenalkan sektor ekonomi moderen (industri gula).

Sebagai perbandingan tulisan ini akan membahas pula pembangunan ekonomi Jepang. Pertimbangannya adalah karena Jepang memulai transformasi ekonominya dalam waktu yang hampir bersamaan. Perbandingan ini bukan dimaksudkan untuk semata membandingkan hasil yang telah diperoleh pada saat ini antara Jepang dan Indonesia, melainkan lebih untuk mencari referensi tentang proses perubahan struktural berkesinambungan yang telah dilakukan Jepang, agar dapat digunakan sebagai bahan untuk merefleksikan transformasi ekonomi di Indonesia.

Untuk memahami proses yang terjadi di Indonesia akan dikaji fakta-fakta yang menunjukkan adanya kekuatan eksternal yang mempengaruhi proses perubahan tersebut. Fakta-fakta tersebut butuh berasal dari data yang didokumentasikan dan kita anggap mampu mendekati kondisi yang sesungguhnya.

INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA

Periode Perdagangan Kapitalis, 1602-1780

Para sejarawan asing menganggap bahwa penjajahan Belanda atas Indonesia telah dimulai sejak runtuhnya VOC yang kemudian posisinya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian baru pada permulaan abad XVII Belanda dianggap secara resmi menduduki Indonesia. Namun demikian, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa Belanda sudah menjajah

Indonesia dalam pengertian yang lebih luas, sejak berdirinya VOC.

Meskipun aktivitas VOC adalah misi dagang, tetapi kalau kita melihat sejarah Eropa, periode tersebut merupakan periode yang sama dengan bangkitnya merkantilisme. Pada masa merkantilisme ideologi negara-negara Eropa adalah membangun kekuatan negara (*state building*). Misi perdagangan identik dengan usaha membangun kekuatan negara, seperti dikonstafasikan Thomas Mun, direktur *East India Company* yang mendapat julukan *Prince of Mercantilists*:

"The ordinary means.... to encrease our wealth and treasure is by foreign trade This ought to be encouraged, for upon it hangs the great revenue of the King, the honor of Kingdom, the noble profession of the merchant, the school of our art, the supply of our poor, the improvement of our lands, the nursery of our mariners, the walls of the Kingdom, the means of our treasure, the sinews of our war, the terror of our enemies".¹

Dengan menggunakan perspektif ini penulis menganggap bahwa Belanda pada era VOC telah pun bisa dikatakan sebagai penjajah. Karena aktifitas perdagangan luar negeri yang dianggap sebagai pendukung kekuatan negara tidak terlepas dari restu kerajaan.

Pada periode tersebut, tambahan pendapatan (persentase dari *NDP-net domestic product*) Belanda yang diperoleh dari Indonesia mengalami peningkatan dari 1,1 % pada tahun 1698-1700 menjadi 1,7 % pada tahun 1778-1780 (tabel 1). Persentase pendapatan Belanda dari Indonesia terhadap *NDP* Indonesia adalah 1,4 % pada tahun 1700 dan 1,2 % pada tahun 1780 (tabel 2). Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari misi perdagangan dapat dilihat dari kuantitas pelayaran dari Belanda ke Indonesia. Antara tahun 1602 dan 1795 tercatat 4.722 kali pelayaran dari Belanda ke Indonesia dan 3.559 pelayaran kembali.²

Masa Transisi, 1780-1830

Pada periode ini, perekonomian Belanda mengalami gangguan dengan adanya perang melawan Inggris. Kejayaan Belanda dalam mengontrol perdagangan di kawasan Asia berakhir dan para pedagang Inggris mulai memasuki kawasan ini, seiring dengan keruntuhan VOC. Pada periode ini perdagangan di kawasan Asia semakin terbuka. Selain para pedagang dari Inggris, pedagang dari Amerika pun menikmati keuntungan di kawasan Asia.³

Meskipun misi dagang Belanda mengalami kehancuran, namun keuntungan Belanda atas Indonesia tidak mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada kenaikan tambahan pendapatan

dari Indonesia atas NDP Belanda. Pada tahun 1770 persentase pendapatan Belanda dari Indonesia sebesar 1,1 % meningkat menjadi 5,5 % pada periode 1868-1872 (tabel 1). Catatan mengenai pendapatan Belanda dari Indonesia untuk tahun 1780-1830 tidak ada, tetapi dengan melihat perubahan dari tahun 1770 ke tahun 1868, kita dapat menduga bahwa pada tahun 1780 hingga 1830 kemungkinan angkanya tidak mengalami penurunan. Persentase pendapatan Belanda dari Indonesia atas NDP Indonesia juga mendukung hal tersebut (tabel 2). Pada tahun 1780 angkanya menunjukkan 1,2 %, dan pada tahun 1830 meningkat menjadi 2,0 %.

Tabel 1
Pendapatan Belanda yang Berasal dari Indonesia, 1700-1938

	DUTC'S NDP AT CURRENT PRICES (IN MILLIONS OF GUILDERS)	INDONESIAN SURPLUS AS RATIO OF DUTC' NDP (%)
1698 - 1700	237	1.1
1778 - 1780	287	1.7
1868 - 1872	1,103	5.5
1911 - 1915	2,566	8.7
1926 - 1930	5,574	8.9

Sumber: *Economic Growth in Indonesia 1820-1940*,

Tabel 2
Pendapatan Eropa di Indonesia, sebagai Persentase dari NDP Indonesia

Year	ALL 'EUROPEAN' income	Year	ALL 'EUROPEAN' income	INCOME OF 'EUROPEAN' residents
1700	1.4	1870	7.6	
1820	2.4	1928	20.2	
1830	2.0	1938	15.5	
1780	1.2	1913	14.2	
1840	7.1	average 1921-38	16.9	12.2

Sumber: *Economic Growth in Indonesia 1820-1940*

Periode Tanam Paksa (Cultivation System), 1830-1870

Berbeda dengan gambaran umum mengenai sistem tanam paksa, banyak sejarawan asing yang memberikan penilaian positif pada sistem ini. Menurut banyak sejarawan asing, dari segi ekonomi, periode tanam paksa merupakan tonggak bagi perekonomian Indonesia memasuki perekonomian yang moderen. Artinya, para petani mulai diperkenalkan dengan tanaman komersial. Sejarawan asing yang menyimpulkan tentang aspek positif dari tanam paksa di Indonesia itu antara lain adalah C. Fasseur dan R.E. Elson. Elson, misalnya menyatakan bahwa:

"the system is unlikely to have caused

*an economic relapse and that it may have furthered rural development."*⁴

Pada era ini, pemerintah Belanda memerintahkan kepada para petani untuk menanam tanaman ekspor (Tebu, kopi, tembakau dan nila), sementara pemerintah Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jendral J. Van den Bosch memonopoli ekspor komoditi hasil panen. Para petani diperintahkan untuk menyerahkan hasil panennya, dan sebagai imbalannya petani memperoleh upah tanam (*planting wage*).

Bukti yang mendukung pendapat bahwa pada masa tanam paksa memberikan keuntungan pada petani pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya terlihat pada tabel 3 dan 4 di bawah ini.

Tabel 3.
Output Total Tanaman Ekspor (1840-1870), dalam matrik ton

YEAR	COFFEE	SUGAR	TOBACCO
1840	54,000	58,000	390
1850	74,000	102,000	1,000
1860	83,000	130,000	6,000
1870	90,000	172,000	8,000

Sumber: *Changing Economy of Indonesia*, Vol. 1, table 4

Tabel 4.
Pembayaran Tanaman Total dan Sewa Tanah di Jawa 1835 - 1870
(dalam ratusan guilders)

YEAR	CROPS PAYMENT	LAND RENT	BALANCE
1835	4.049	5.699	- 1.650
1840	10.739	7.085	+ 3.654
1845	9.806	8.888	+ 918
1850	11.750	7.987	+ 3.763
1855	13.060	8.479	+ 4.581
1860	16.176	9.999	+ 6.177
1865	15.808	11.175	+ 4.633
1870	16.636	13.180	+ 3.456

Sumber: *Changing Economy of Indonesia*, Vol.14, table A21

Tabel 5.
Jumlah Penduduk, Padi per Wilayah, dan Produksi Padi di Jawa, 1836-1870

YEAR	A	B	C	D	E	F
1836-40	6,404	790	1,208	0.62	0.12	189
1841-45	7,129	875	1,515	0.61	0.12	212
1846-50	7,435	959	1,612	0.64	0.13	217
1851-56	7,941	1,028	1,697	0.65	0.13	214
1856-60	9,424	1,172	2,020	0.62	0.12	214
1861-65	10,731	1,253	2,110	0.58	0.12	197
1866-70	12,397	1,396	2,456	0.56	0.11	198

A *Population (in thousands) of region under consideration*

B *Area under rice as first crop (in thousands of hectares)*

C *Rice production of area under rice as first crop (in thousands of metric tons of unhusked rice)*

D *Area under rice per household of 5 persons (in hectares)*

E *Area rice per capita (in hectares)*

F *Kg unhusked rice per capita (first crop)*

Sumber: The cultivation reports, in Peter Boomgaard, *Java's Agricultural Production 1775-1875*.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, apa yang di capai oleh Indonesia dalam kurun waktu tersebut menunjukkan prestasi yang baik. Artinya, jika teori *Vent for surplus* dari Hla Myint menggunakan hasil ekspor yang menunjukkan gejala menaik akan berpengaruh positif bagi pembangunan. Di samping itu, dalam skala mikro bisa kita lihat hasil positif yang dinikmati petani. Hal tersebut ditunjukkan oleh selisih positif antara penerimaan hasil panen dan pembayaran sewa tanah lihat tabel 5.

Tapi, di balik itu, sistem tanam paksa juga menghasilkan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Yakni sedotnya kekayaan Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1860-an, sepertiga dari pendapatan nasional Belanda (*Dutch national income*) diperoleh dari sistem tanam paksa.⁵

Periode Liberal Hingga Akhir Penjajahan Belanda (1870-1942)

Pada periode ini terjadi perkembangan dalam perpolitikan di Belanda. Parlemen Belanda kala itu menghendaki peran swasta dalam perekonomian, maka berakhirilah *Cultivation system*. Dengan berakhirnya masa tanam paksa. Maka perekonomian Belanda beralih ke masa liberal. Pemerintah Belanda tidak ikut campur tangan dalam perekonomian. Meskipun relatif agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, Belanda akhirnya menempuh liberalisme ekonomi. Kebangkitan swasta dalam perekonomian ini tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di Eropa pada umumnya. Hal ini juga berlangsung di negara jajahan Belanda (Indonesia).

Tabel 6
Pertumbuhan Penduduk dan Pendapatan Riil

YEAR	POPULATION (IN THOUSANDS) 1928 GULDERS)	TOTAL INCOME (IN MILLIONS OF	PER CAPITA INCOME (IN 1928 GULDERS)
1830	17,445	823	47.2
1840	18,622	879	47.2
1870	26,200	1,237	47.2
1913	47,282	2,454	51.9
1928	57,403	3,524	61.4
1929	58,264	3,421	58.7
1937	65,634	3,968	60.5
1938	66,619	4,277	63.3

Sumber: *Angus Madison*

Tabel 7.
Pertumbuhan Rata-rata Tahunan Volume Ekspor Indonesia
dan Dunia 1840-1970

YEAR	WORLD	INDONESIA
1840 to 1860	5.6	1.7
1860 to 1880	4.3	3.4
1876/80 to 1896/1900	3.0	3.3
1900 to 1911/13	4.2	5.4
1911/13 to 1926/29	1.1	7.0
1926/29 to 1936/38	-0.3	0.3
1936/38 to 1953/58	3.0	1.6
1953 to 1966	7.0	0.8
1960 to 1970	9.0	5.4

Sumber: IMF, *World Economic Outlook, 1959, 1990....*, sebagaimana dikutip Anne Booth.

Pada periode liberalisme ekonomi ini fakta menunjukkan adanya peningkatan pendapatan di kalangan penduduk Indonesia (indigenous). Beberapa penulis asing memberikan kesimpulan yang sama mengenai peningkatan pendapatan penduduk Indonesia pada periode ini (Polak, Anne Booth). A. Madison, misalnya, menyatakan:

"In the 1870-1928 period there have been an increase in indigenous Indonesian income,.....

*It seems clear, however, that the growth in indigenous per capita income was more modest than that of Europeans, which was largely geared to the export sector, where trade volumes rose rapidly."*⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh Madison di atas, kenaikan pendapatan perkapita penduduk Indonesia merupakan dampak dari kegiatan ekspor. Hal ini disebabkan oleh peran swasta yang meningkat dengan adanya kebijakan

liberalisme ekonomi. Iklim yang kondusif bagi peran swasta mengakibatkan ekspor Indonesia menunjukkan angka yang mengesankan, lihat tabel 7.

Selama periode liberalisasi ekonomi tersebut pertumbuhan ekspor Indonesia selain lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor dunia. Ini merupakan prestasi yang bahkan hampir tidak pernah dicapai oleh Indonesia dalam masa kemerdekaan. Dari angka tersebut secara logis dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kinerja ekonomi yang baik.

Untuk memahami dan menyimpulkan kondisi pembangunan ekonomi Sebagaimana disimpulkan oleh beberapa pengkaji sejarah asing atas kondisi pembangunan ekonomi Indonesia pada masa penjajahan kita tidak bisa hanya menggunakan indikator-indikator kuantitatif. Sebab, indikator-indikator kuantitatif itu tidak mampu menunjukkan gambaran yang mendalam. Kalau kita sepakat untuk menafsirkan kondisi pembangunan ekonomi fakta-fakta di atas kita akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan para pengkaji sejarah asing tersebut. Berikut ini, akan penulis paparkan kondisi pembangunan ekonomi Indonesia.

Tapi, sebelumnya penulis akan mencoba mendeskripsikan kondisi Indonesia pada jaman penjajahan Jepang.

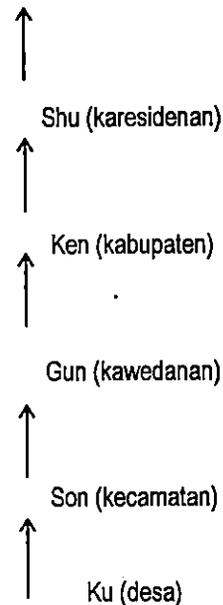
Periode Penjajahan Jepang (194-1945)

Dengan masuknya Jepang ke Indonesia, menggantikan kedudukan Belanda, maka kondisi (eksploitasi) ekonomi mengalami perubahan. Pada masa penjajahan Jepang, para petani dipaksa untuk menyerahkan padi kepada pihak Jepang. Pihak Jepang berkepentingan atas tersedianya bahan makanan yang diperlukan untuk mendukung kekuatan militernya, yang beroperasi tidak hanya di wilayah Indonesia, tetapi juga meliputi kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

Hal ini sebenarnya merupakan beban berat bagi petani. Sebab, mereka sebenarnya

lebih miskin. Lahan pertanian mereka pada umumnya sangat sempit. Sehingga, para petani hanya menghasilkan panen pada tingkat sub-sistem. Hal ini diperparah dengan adanya jeratan hutang dari para rentenir Cina yang mengenakan bunga tinggi.

Gambar 1
Bagan penyerahan padi:
Shokuryo Kanri Zimusyoo (Kantor
Pengelolaan Pangan)



Karena beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia (Jawa), maka eksploitasi hasil pertanian ini berpengaruh pada penurunan kesejahteraan penduduk. Pengaruhnya demikian besarnya, yakni menimbulkan ketidakpuasan umum dan menurunkan taraf sosial ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan serangkaian pemberontakan di Indramayu pada tahun 1944.⁷

Proses eksploitasi Jepang atas petani dapat digambarkan seperti diagram berikut. Padi dari desa hingga ke kantor Pengelolaan

Pangan (SKZ - Shokuryo Kanri Zimusyo). SKZ ini berada di bawah Departemen Ekonomi. SKZ mempunyai wewenang untuk menentukan mekanisme pembelian dan penyerahan padi, menetapkan kuantitas dan harganya, serta memberi izin penggilingan.

Eksplotasi ekonomi Indonesia oleh Jepang berbeda dengan yang dilakukan Belanda sebelumnya. Kalau Belanda lebih menitikberatkan pada pemaksaan petani untuk menanam tanaman ekspor di tanah pertanian padi, maka Jepang membiarkan petani menanam tanaman padi, tapi padi tersebut sebagian harus diserahkan kepada pihak Jepang. Dengan melihat perbandingan itu, para pengkaji sejarah Indonesia menilai bahwa kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang lebih buruk dibandingkan dengan pada masa Belanda. Dr. Charles Himawan, Misalnya menyatakan:

*"Under the Europeans' oppresive laws of investment, there was still room for the Indonesians to retain whatever little they had for their own use. Under the Japanese, however, every productive means was mustered to fulfil Japans' needs."*⁸

KOMPARASI PROSES PENGEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DENGAN JEPANG

Sebagai perbandingan kita bisa menelaah proses pembangunan ekonomi Jepang. Meskipun kondisi ekonomi Jepang saat ini jauh berbeda dengan Indonesia, namun pada awal-awal pembangunan, kondisi ekonomi kedua negara ini hampir sama. Para pengamat sepakat untuk mengatakan bahwa Jepang mengalami keajaiban dalam pembangunan ekonomi. Meskipun infrastruktur dihancurkan oleh sekutu, Jepang mampu bangkit menjadi negara raksasa di bidang ekonomi.

Maksud dari perbandingan ini adalah untuk memahami proses yang terjadi pada kedua negara, sehingga bisa diketahui faktor fundamental yang menyebabkan keberhasilan maupun yang faktor yang menghambat. Dengan memahami proses pembangunan yang terjadi kita akan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan pembangunan ekonomi. Memahami proses pembangunan ekonomi berarti memperhatikan transformasi ekonomi yang terjadi, yang menunjukkan adanya pergeseran peran sektor-sektor

Tabel 8.

Perbandingan Persentase Ekspor terhadap GNP Indonesia-Jepang

TAHUN	EKSPOR/GNP (%) INDONESIA	EKSPOR/GNP JEPANG	TAHUN
1870	8,5	4,5	1873-77
1913	19,33	20,2	1913-17
1928	27,39	16,5	1928-32
1937	30,93	21,6	1933-37
1950	29,03	7,1	1948-52

Sumber: Indonesia - Angus Maddison, *Economic Growth In Indonesia*, p. 27-28 (diolah).
Jepang - Yoshihara Kunio, *Perkembangan Ekonomi Jepang*, p. 52.

ekonomi. Pergeseran peran sektoral dalam perekonomian negara-negara pada umumnya menunjukkan pola yang sama, yaitu dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Kemudian untuk mengetahui seberapa moderen perekonomian suatu negara kita bisa melihat persentase ekspor terhadap GNP. Meskipun tidak ada batasan yang jelas mengenai besarnya persentase yang mencerminkan kemoderenan ekonomi, namun mudah dipahami bahwa jika persentase ekspor terhadap GNP semakin tinggi itu berarti bahwa perekonomian negara tersebut semakin terintegrasi ke dalam perekonomian dunia. Dalam perspektif historis hal demikian menunjukkan bahwa perekonomian tersebut semakin moderen. Artinya produksi yang dihasilkan tidak sebatas untuk konsumsi sendiri.

Dari data yang tampak pada tabel 8, kita akan dengan mudah menarik kesimpulan bahwa, Indonesia memiliki keunggulan dibanding Jepang. Modernitas ekonomi Indonesia yang ditinjau dari persentase ekspor terhadap GNP mendorong para pengamat sejarah sampai pada keyakinan tentang manfaat ekonomis yang dinikmati oleh Indonesia dari jaman penjajahan. Hal tersebut didukung oleh fakta historis bahwa Indonesia mempunyai indikator yang baik di jaman penjajahan Belanda, bahkan dibandingkan dengan Jepang sekalipun.

PEMBANGUNAN SEBAGAI SUATU PROSES BERKESINAMBUNGAN

Dengan melihat fakta historis, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah bagaimana Jepang mampu berproses menjadi negara maju dan solid secara ekonomi?

Bagaimana dengan Indonesia? Mengapa tidak sama dengan Jepang? Untuk mencari penjelasan mengenai perbedaan ini kita juga perlu suatu kajian historis. Hal ini tidak bisa di-

hindarkan, mengingat pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berkesinambungan.

Perspektif Historis Pembangunan Jepang

Dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Jepang masih tertinggal dalam pembangunan ekonomi moderennya. Ekonomi negara-negara Eropa pada akhir abad ke 18 sudah memasuki perekonomian yang moderen dengan proses historis yang dinamakan revolusi industri, yang dimulai di Inggris sebelum 1750⁹. Sementara Jepang masih didominasi oleh sektor pertanian. Bahkan pada tahun 1910-an pun Jepang belum dapat dikatakan sebagai negara moderen, sebagaimana ditulis oleh Prof Rosovsky dari Harvard university:

*"Japan was not - even by standards of the time - a modern economy by 1900 or 1910"*¹⁰

Keberhasilan Jepang dalam membangun ekonomi tidak terlepas dari proses historis, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga kelembagaan yang mendukung pembangunan ekonomi. Pada periode Meiji (1868-1885), Jepang melakukan beberapa perubahan yang dianggap mendasar. Pembaharuan di bidang politik dan sosial perlu dilakukan, mengingat kondisi yang menghambat pembangunan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama pada jaman Tokugawa (1603-1867).

Penghapusan desentralisasi dan pembatalan hak-hak istimewa feodal merupakan pembaharuan di bidang sosial politik. Untuk bidang ekonomi Jepang melakukan perubahan sistem pajak dan moneter. Sistem pajak pada jaman Tokugawa berupa padi (*natura*) digantikan dengan sistem uang. Nilai dari pajak tanah sebesar tiga persen dari harga tanah yang dihitung berdasarkan produktivitas rata-rata dan tingkat bunga pasar.¹¹ Setelah sistem baru pajak tanah diberlakukan, pemerintah Meiji memperoleh penerimaan dari pajak tanah

dalam jumlah yang besar untuk pengeluaran pembangunan. Sedangkan untuk bidang moneter, diberlakukan sistem standar emas dan uang kertas yang diedarkan keseluruh negara.¹²

Latar belakang historis tersebut merupakan faktor fundamental bagi Jepang untuk membangun perekonomiannya pada tahap berikutnya. Di samping itu ada faktor lain yang sangat penting bagi pembangunan Jepang, yaitu faktor kultur. Masyarakat Jepang pada tahap awal pembangunannya dikenal memiliki kultur pertanian, dimana kerjasama merupakan aspek yang menonjol.¹³ Kultur kerjasama ini tidak hilang meskipun Jepang sudah berhasil mentransformasikan ekonominya dari agraris ke industri.

Perspektif Struktural dalam Proses Pembangunan

Proses pembangunan ekonomi tidak bisa terlepas dari struktur masyarakat di suatu negara. Aktifitas pembangunan yang merupakan wujud dari dinamika masyarakat, bergerak dalam pola (struktur) tertentu. Setiap struktur aspek statis dari proses (pembangunan ekonomi) dan sebaliknya, setiap proses merupakan aspek dinamis suatu struktur.¹⁴ Dengan menggunakan perspektif struktural dapat menganalisa fakta-fakta historis. Tanpa menggunakan pendekatan ini, sejarah hanya merupakan kumpulan fakta yang hanya mampu dijelaskan secara naratif.

Dalam kaitannya dengan komparasi proses pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Jepang, terdapat perbedaan yang sangat fundamental. Perbedaan struktur tentunya membawa konsekuensi logis bagi proses pembangunan ekonomi berikutnya. Kajian tentang keberhasilan Jepang selama ini lebih banyak difokuskan pada kultur seolah mengabaikan perspektif struktural yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Sebagaimana telah disinggung di atas Jepang telah merombak struktur yang berlaku pada era Tokugawa (reformasi

Meiji) yang memungkinkan proses pembangunan ekonomi berjalan dengan cepat.

Satu hal yang tidak bisa dibantah oleh para pengkaji sejarah adalah, perubahan struktural yang terjadi di Jepang berlangsung tanpa keterlibatan kekuatan asing (penjajah). Artinya, dinamika politik yang terjadi di Jepang pada masa peralihan dari Tokugawa ke jaman Meiji merupakan dinamika internal, sehingga pilihan-pilihan perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakatnya. Secara tradisional masyarakat Jepang sangat tunduk pada penguasa, sehingga memungkinkan perubahan yang terjadi tidak membawa gejolak yang serius yang bisa mengganggu proses pembangunan ekonominya. Dengan kata lain, Jepang tidak menghadapi gangguan eksternal (*external disturbance*) dalam proses pembangunannya.

Dalam analisa komparasi dengan Jepang, satu hal yang tidak dimiliki Indonesia adalah kebebasan dari gangguan eksternal. Ini faktor eksternal yang mengganggu proses pembangunan ekonomi Indonesia berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Faktor eksternal (penjajahan) yang dalam posisi dominan tidak memberikan pilihan-pilihan bebas bagi masyarakat Indonesia menyebabkan dinamika pembangunan ekonomi Indonesia terganggu. Status sebagai negara terjajah tidak memungkinkan masyarakat Indonesia menentukan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri baik dari aspek politis maupun ekonomis.

Aspek kebebasan ini merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan politis masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Milton Friedman: "*Freedom in economic arrangements is itself a component of freedom broadly understood, so economic freedom is an end in itself. In the second place, economic freedom is also an indispensable means toward the achievement of political freedom.*"¹⁵

Dalam kaitannya dengan kasus Indonesia kita mengalami kondisi politis yang diken-

dalikan oleh kekuatan penjajah. Mengacu pada pendapat Milton Friedman, maka bangsa Indonesia berada pada kondisi yang tidak memungkinkan melakukan aktifitas pembangunan secara bebas. Dibandingkan dengan Jepang, kondisi Indonesia sangat berbeda. Sehingga meskipun pada tahun 1900-an kondisi ekonomi Jepang hampir sama dengan Indonesia, struktur (politik dan ekonomi) kedua negara tersebut tidak bisa disamakan. Sehingga mudah dipahami kalau proses pembangunan yang dilalui oleh Jepang berjalan dengan alamiah. Dengan kata lain, proses pembangunan ekonomi Jepang berada pada garis yang berkesinambungan. Sementara Indonesia baru mulai membangun struktur yang baru setelah mendapatkan kebebasan (kemerdekaan), sehingga terdapat *discontinuity* dalam proses pembangunan Indonesia.

Kembali pada proses transformasi ekonomi, kalau faktor *discontinuity* kita terapkan pada transformasi ekonomi, maka akan mudah dipahami akar sejarah dari terpisahnya perkembangan sektor moderen dan sektor tradisional. Kehadiran Belanda menyebabkan transformasi ekonomi tidak berjalan sesuai dengan skenario yang terencana, karena penjajah mempunyai kepentingan ekonomi tersendiri atas negara jajahannya. Sehingga, tidak heran jika Indonesia tidak dapat melakukan transformasi ekonomi sebagaimana dilakukan oleh Jepang. Jepang mempersiapkan sektor pertanian sedemikian rupa untuk mendorong sektor industri. Jepang melukiskan secara terbaik apa yang dinamakan pertumbuhan pertanian "prasyarat," dimana perkembangan pertanian didahulukan dan dirasa perlu bagi perkembangan sektor lain.¹⁶ Sektor pertanian Jepang memainkan peranan yang cukup strategis yaitu: (1) sebagai sumber devisa (untuk mengimpor teknologi) utama sebagai hasil ekspor dan sutera, (2) Sumber tenaga kerja bagi perkembangan industri, (3) Sumber pajak yang digunakan untuk

membayai pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor sekunder, (4) Besarnya masyarakat yang terlibat dalam sektor pertanian merupakan pasar yang sangat berarti bagi penyerapan produk industri.

SIMPULAN

Dari uraian di muka dapat disimpulkan bahwa para pengkaji asing tentang sejarah ekonomi Indonesia terlalu menyederhanakan masalah dengan membuat kesimpulan bahwa Indonesia menikmati keuntungan dari segi ekonomi dengan adanya penjajahan Belanda. Kesimpulan yang didasarkan pada indikator-indikator ekonomi merupakan kelemahan mendasar dalam memahami proses pembangunan ekonomi. Faktor fundamental, yaitu kebebasan dalam pengertian luas memainkan peranan yang sangat penting dalam dinamika pembangunan. Struktur politik yang terkonsentrasi pada pemerintah Belanda menyebabkan tidak adanya peluang bagi bangsa Indonesia untuk membuat skenario transformasi ekonomi sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Latar belakang historis inilah yang mengakibatkan perbedaan yang mendasar antara Indonesia dan Jepang dalam mentransformasikan ekonominya dari sektor tradisional ke sektor moderen. Barangkali, penulis juga terjebak dalam hal menyederhanakan masalah, yaitu hanya memfokuskan pembahasan pada aspek struktur tanpa memasukan unsur kultur dalam mengkomparasikan proses pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Jepang.

Tetapi, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa latar belakang historis yang berbeda (faktor struktur) akan membawa konsekuensi logis yang berbeda. Lagi pula penulis tidak berpretensi untuk membandingkan hasil (indikator ekonomi) yang dicapai oleh kedua negara pada saat ini. Penulis hanya ingin menekankan bahwa keberhasilan Jepang dalam mentransformasikan ekonominya sangat dipengaruhi oleh keleluasaan

Jepang dalam mendesain perubahan ekonomi, dan hal tersebut tidak dimiliki oleh Indonesia. Sehingga, penulis sampai pada kesimpulan

bahwa problem keterlepasan pembangunan sektor moderen dengan sektor tradisional memiliki akar sejarah, yaitu sejak jaman penjajahan.

DAFTAR PUSTAKA

A.J. Youngson (ed), (1972), *Economic Development In The Long Run*, George Allen & Unwin, Great Britain

Akira Nagazumi (pen), (1988), *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

Angus Maddison And Ge Prince (ed), (1989), *Economic Growth In Indonesia 1820-1940*, Dordrecht-Holland, Foris Publication

Anthony Reid, (1984), "The Pre-Colonial Economy of Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 10. No. 2, August,

Charles Himawan, (1980), *The Foreign Investment Process In Indonesia*, Singapore., Gunung Agung

Eric Roll, (1953), *A History of Economic Thought*, Third edition, New Jersey., Prentice-Hall Inc

Friedlaender and Oser, (1953), *Economic History of Modern Europe*, New York., Prentice-Hall

Hiroyoshi Kano, (1997), *Land Tax, Property Rights And Agrarian Conflict: A View From Comparative History*, Paper seminar

Hal Hill, (1996), *The Indonesian Economy Since 1966*, UK., Cambridge University Press

J.Th. Linblad (ed), *Historical Foundations of A National Economy In Indonesia, 1890s-1990s*,

Royal Netherlands Academy of Art And Sciences, (1994), Amsterdam

Lewis H. Haney, (1958), *History of Economic Thought*, Fourt edition, New York, The Macmillan Company

Milton Friedman, (1962), *Capitalism And Freedom*, Chicago & London, The University of Chicago,

Michael P. Todaro, (1994), *Economic Development*, Fifth edition, New York, Longman.

Pierre Van Der Eng, "Challenging Changes: Current Themes In The Economic History Of Indonesia", *NEHA-Bulletin* 10 - 1996-nr. 2.

Robert A. Scalapino dkk (pen), (1990), *Perkembangan Ekonomi Asia: Masa Kini dan Masa depan*, Jakarta, CSIS

Ryuzo Sato (ed), (1992), "Japan and The World Economi", *International Journal of Theory and Policy*, North-Holland, Leonard N. Stern School of Business New York University, NY, USA, Vol. 2,

Sartono Kartodirdjo, (1993), *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Jakarta

Thee Kian Wie, (1994), *Explorations In Indonesian Economic History*, Jakarta, Lembaga Penerbit F.E UI

V.J.H. Houben, (1997), *The Pre-Colonial Economy*, Draft Chapter, June,

Yoshihara Kunio, (1983), *Perkembangan Ekonomi Jepang*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Yujiro Hayami dan Masao Kikuci, (1987), *Dilema Ekonomi Desa*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

-
- ¹ L.H. Haney, *History Of Economic Thought*, The Macmillan Company, New York, Seventh printing, 1958, P.121.
- ² J.Th. Linblad, (1989), "The Economic History of Colonial Indonesia; An Historiographical Survey", *Economic And Social History In The Netherlands*, Leiden
- ³ Angus Madison, (1989), "Ducth Income In And From Indonesia", 1700-1938, in Angus Madison and GE Prince (ed), *Economic Growth In Indonesia 1820-1940*, Foris Publication, Dordrecht-Holland, P. 18
- ⁴ Pierre van der Eng, (1996), "Challenging Changes: Current Themes In The Economic History of Indonesia" *NEHA Bulletin* 10, Amsterdam, nr. 2, p. 90.
- ⁵ Vincent J.H. Houben, (1997), *The Consolidation of The Territorial State: Java In The Nineteenth Century*, Chapter III (draft chapter), June, p. 7.
- ⁶ Angus Madison, *ibid*, P.21.
- ⁷ Aiko Kurasawa, (1988), "Pendudukan Jepang Dan Perubahan Sosial", dalam Akira Nagazumi, *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 84.
- ⁸ Charles Himawan, (1980), *The Foreign Investment Process In Indonesia*, Gunung Agung, Singapore, p. 211.
- ⁹ H. E. Friedlaender and J. Oser, (1953), *Economic History of Modern Europe*, Prentice-Hall, New York, p. 60.
- ¹⁰ H. Rosovsky, (1972), "What Are The "Lessons" of Japanese Economic History?", in A.J. Youngson, *Economic Development In The Long Run*, George Allen & Unwin Ltd, London, p. 230.
- ¹¹ Hiroyozhi Kano, (1997), *Land, Property Rightz And Agrarian Conflict: Aviewv From Comparative Hiztory*, Paper.
- ¹² Yozhihara Kunio, (1983), *Perkembangan Ekonomi Jepang*, Gramedia, Jakarta, hal. 3.
- ¹³ Takemoto Linuma, (1992), U.S.-Japan: "What We Have Learned Since Pearl Harbor", *Japan And The World Economy: International Journal Of Theory And Policy*, Vol 4, No. 2.
- ¹⁴ Sartono Kartodirdjo, (1993), *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia, hal. 113.
- ¹⁵ Milton Friedman, *Capitalism And Freedom*, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1982, p. 8
- ¹⁶ Hadi Soesastro, (1990), "Jepang "Guru"-Asean "Murid": Apa Bisa Jalan", dalam Robert A. Scalapino, Seizaburo Sato dan Jusuf Wanandi (Penyunting), *Perkembangan Ekonomi Asia: Masa Kini dan Masa depan*, CSIC, Jakarta, hal. 168.